

JURNAL HUKUM

**TANGGUNG JAWAB PENYIDIK POLRI TERHADAP
PENGGELOMPOK BARANG BUKTI DI POLDA DIY**



Diajukan oleh :

Cyntia Chrisma Nafiriyanti

NPM : 13 05 11247

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

**TANGGUNG JAWAB PENYIDIK POLRI TERHADAP
PENGHELAPAN BARANG BUKTI DI POLDA DIY**



Diajukan oleh:

Cyntia Chrisma Nafiriyanti

NPM : 13 05 11247

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 20 Desember 2016**

Dosen Pembimbing,

Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

FX. EndroSusilo, S.H., LL.M.

TANGGUNG JAWAB PENYIDIK POLRI TERHADAP PENGGELAPAN BARANG BUKTI DI POLDA DIY

Cyntia Chrisma Nafiriyanti

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

The function of exhibit in the criminal justice process is is very importantl, namely as a means of proof to substantiate the belief of the judge in examining and decide a case. Investigators as one of the law enforcement officer shall execute his responsibilities properly and in accordance with existing procedures. Police investigators have a responsibility towards the security and the integrity of the evidence. The purpose of this research was based on the formulation of a problem is to find out the responsibility of the police investigators against exhibit in Yogyakarta regional police and what sanctions are imposed for police investigators who use exhibits a criminal offense. This type of research is a kind of normative legal research. Based on the results of the research, it can be concluded that the police investigator a responsibility to care exhibit is to maintain the integrity of the exhibit obtained, by way of immediately leave the exhibit to the official the Official maintainer of the exhibits within 1 x 24 hours. If the police investigators do not carry out their responsibilities, then there will be the sanction given.

Keywords: *Exhibit, Police investigators, Liability, Sanctions.*

1. PENDAHULUAN

Proses peradilan yang sesuai dengan prosedur menjadi penentu keberhasilan dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam peradilan pidana. Salah satu pembuka jalan dalam proses peradilan pidana ialah dengan ditemukannya barang bukti. Untuk mengumpulkan bukti permulaan yang

cukup, sebelum penangkapan dilakukan, haruslah terkumpul data dan fakta melalui kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan.¹ Fungsi barang bukti dalam proses peradilan sangat penting yaitu sebagai sarana pembuktian untuk memperkuat keyakinan hakim dalam

¹ Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 111.

memeriksa dan memutus suatu perkara. Bukti permulaan yang sudah ditemukan oleh penyidik dalam proses penyelidikan lalu diproses oleh penyidik. Kemudian barang bukti tersebut untuk sementara oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini penyidik Polri, diambil alih dan/atau disimpan dibawah penguasaannya karena diduga tersangkut dalam suatu tindak pidana.² Barang bukti yang telah diperoleh penyidik tersebut akan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Penyidik sebagai salah satu aparat penegak hukum haruslah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada. Proses peradilan, dalam hal ini proses penyidikan yang berjalan dengan baik tersebut menjadi langkah utama dalam penegakan hukum di Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berisi bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap warga negara Indonesia termasuk aparat penegak hukumnya harus patuh pada hukum demi mencapai kesejahteraan dan keadilan. Pengertian penyidik dan penyidikan di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang. Dalam Pasal 1

angka 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tertulis pengertian Penyidik dan apa itu penyidikan. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menemukan pelaku tindak pidana. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tertulis bahwa penyidik adalah pejabat POLRI yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan oleh undang-undang. Dalam Pasal 60 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan tertulis bahwa setiap benda sitaan harus disimpan dan dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

Berdasarkan berbagai peraturan mengenai penyidik, penyidikan, dan barang bukti di atas, dapat dipahami bahwa antara satu peraturan dengan peraturan yang lain telah terjadi sinkronasi, artinya tidak ada hal yang

² Ratna Nurul Afiah, 1989, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

bertentangan satu sama lain. Berbagai peraturan tersebut sama-sama mengatur bahwa dalam pengelolaan barang bukti oleh penyidik polri harus dititipkan terlebih dahulu untuk selanjutnya disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Yang menjadi problematik hukum dari berbagai peraturan tersebut ialah mengenai fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Jelas bahwa penyidik dalam proses pengelolaan barang bukti harus dititipkan untuk disimpan terlebih dahulu di Rupbasan, tetapi faktanya berbeda. Banyak penyidik, khususnya penyidik Polri tidak menyimpan dan menitipkan barang bukti yang diperoleh, tetapi mempergunakan barang bukti tersebut untuk kepentingannya sendiri. Hal tersebut berarti ada ketidaksesuaian antara fakta sosial dengan berbagai peraturan yang sudah ada.

Rumusan masalah yang diangkat adalah:

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah bentuk tanggung jawab penyidik POLRI terhadap pengelolaan barang bukti di POLDA DIY?
2. Apakah sanksi bagi penyidik POLRI yang menggelapkan barang bukti suatu tindak pidana?

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan tanggung jawab penyidik polri terhadap penggelapan barang bukti di polda DIY.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan hukum primer terdiri atas:

- 1) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berisi bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap warga negara Indonesia termasuk aparat penegak hukumnya harus patuh pada hukum demi mencapai kesejahteraan dan keadilan.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 1 dan 2 perihal penyidik dan penyidikan, Pasal 2 ayat (16) perihal pengertian barang bukti, Pasal 6 ayat (1) perihal pembagian penyidik, Pasal 7 ayat (1) perihal wewenang penyidik polri, Pasal 32 perihal penggeledahan oleh penyidik polri, dan Pasal 44 ayat (2) perihal penyimpanan barang bukti dan larangan penggunaan barang bukti oleh pihak yang tidak berkepentingan.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 417 perihal penggelapan dalam jabatan.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2), Pasal 1 angka 11 perihal pengertian penyidik pegawai negeri sipil, Pasal 1 angka 12 perihal pengertian penyidik pembantu.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2), Pasal 6 huruf i perihal larangan penggunaan barang bukti secara pribadi oleh penyidik polri, Pasal 7 perihal sanksi bagi penyidik polri yang melakukan pelanggaran, Pasal 13 perihal pemberhentian penyidik polri tidak secara terhormat.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90), Pasal 2A

ayat (1) perihal syarat untuk diangkat menjadi penyidik polri, Pasal 3 ayat (1) perihal syarat untuk diangkat menjadi penyidik pembantu, Pasal 3A perihal syarat untuk diangkat menjadi penyidik pegawai negeri sipil.

- 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 204 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014), Pasal 1 angka 5 perihal pengertian barang bukti, Pasal 1 angka 8 perihal pejabat negara yang bertugas dan berwenang dalam pengelolaan barang bukti, Pasal 6A perihal pengelompokan barang bukti, Pasal 8 perihal

prosedur pengelolaan barang bukti, Pasal 11 perihal tugas dan wewenang pejabat pengelola barang bukti, Pasal 24 perihal pengawasan terhadap pengelolaan barang bukti, Pasal 26 perihal pengawasan pengelolaan barang bukti secara khusus.

- 8) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608), Pasal 21 ayat (1) perihal sanksi pelanggaran kode etik profesi polri dan sanksi administratif.
- 9) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686), Pasal 15 perihal tahapan pelaksanaan penyidikan, Pasal 91 dan 92 perihal sanksi bagi penyidik polri yang melakukan pelanggaran.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum, dan statistik dari instansi resmi. Bahan hukum sekunder juga dari narasumber yaitu Kepala Unit Simin Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda DIY.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, internet, fakta hukum, statistik dari instansi resmi, dan dokumen.

b. Narasumber

Wawancara dilakukan kepada narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian.

4. Analisis Data

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer yang akan

dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut :

a. Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.

b. Sistematisasi akan dilakukan secara vertikal dan horisontal. Secara vertikal terdapat sinkronisasi antara Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan sehingga prinsip hukumnya adalah subsumsi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan

perundang-undangan. Disisi lain secara horisontal sudah ada harmonisasi antara Pasal-pasal dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan . Prinsip penalaran hukumnya adalah Non Kontradiksi. Sehingga tidak diperlukan asas berlakunya perundang-undangan.

c. Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer yang dapat dievaluasi atau dikritisi atau dikaji sebab peraturan perundang-undangan itu sistemnya terbuka.

d. Interpretasi hukup positif, yaitu manafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan 3 metode intepretasi, yaitu :

a) Gramatikal yaitu mengartikan terminologi bagian kalimat menurut

bahasa sehari-hari atau hukum

b) Sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum

c) Teleologi yaitu setiap interprestasi pada dasarnya teleologi atau tujuan yang ingin dicapai

e. Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu tanggung jawab penyidik polri terhadap penggelapan barang bukti.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab penyidik polri, penggelapan barang bukti dan berakhir pada hasil penelitian mengenai tanggung jawab penyidik polri terhadap penggelapan barang bukti di polda DIY.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Barang bukti memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penyelesaian perkara pidana, dimana barang bukti dapat digunakan untuk membuat terang terjadinya suatu tindak pidana. Oleh karena itu, barang bukti harus dikelola sesuai dengan prosedur yang benar. Di Indonesia, prosedur pengelolaan barang bukti diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 jo. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prosedurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang bukti temuan yang telah disita penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib diserahkan kepada Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB);
- b. PPBB wajib melakukan pencatatan ke dalam buku register dan disimpan pada tempat penyimpanan barang bukti;
- c. Barang bukti temuan berupa benda yang mudah rusak atau membahayakan, dapat diambil tindakan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana;
- d. Barang bukti temuan berupa narkoba jenis tanaman, dalam

waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib dimusnahkan sejak saat ditemukan, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat diketahui tugas dan tanggung jawab penyidik polri dalam pengelolaan barang bukti, yaitu adalah segera menitipkan barang bukti kepada Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB) dalam waktu 1 x 24 jam. Apabila penyidik polri tidak melakukan penitipan sebagaimana dimaksud di atas, maka ia harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan barang bukti tersebut.

Menurut Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tertulis bahwa :

“Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.”

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis telah melakukan wawancara dengan narasumber, yaitu Ipda Sularni yang menjabat sebagai Kepala Unit Simin Barang Bukti Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda DIY. Narasumber

Ipda Sularni mengemukakan bahwa penyidik polri yang melakukan penyidikan dan mendapatkan barang bukti memiliki tanggung jawab untuk segera melapor dan menitipkan barang bukti tersebut ke tempat-tempat yang sudah tersedia. Adapun tempat penitipan barang bukti yang dimaksud ialah Bagtahti dan Subbagtahti pada tingkat Mabes Polri; Dittahti pada tingkat Polda; Sattahti pada tingkat Polres; Urttahti pada tingkat Polsek; Rupasban.

Dalam Pasal 24 Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tertulis bahwa pada dasarnya kegiatan pengelolaan barang bukti ini dilakukan pengawasan, baik pengawasan secara umum maupun pengawasan secara khusus. Pengawasan secara umum dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Memeriksa administrasi dan buku register daftar barang bukti;
- b. Memeriksa kondisi tempat penyimpanan;
- c. Memeriksa kondisi fisik barang bukti.

Pengawasan secara khusus dilakukan apabila terjadi kejadian yang berdifat khusus, sehingga perlu dibentuk tim yang ditunjuk berdasarkan surat perintah (Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2010 jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia). Kejadian yang bersifat khusus tersebut antara lain :

- a. Adanya laporan atau ditemukannya penyimpangan;
- b. Penyalahgunaan barang bukti;
- c. Hilangnya barang bukti; dan
- d. Adanya bencana yang bisa mengakibatkan barang bukti hilang atau rusak.

Penyidik polri yang menggunakan atau menghilangkan barang bukti bukan untuk kepentingan-kepentingan sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 atau dengan kata lain ia telah menggelapkan barang bukti, dapat diajukan agar dilakukan pemeriksaan untuk dilihat apakah terjadi pelanggaran disiplin atau kode etik.³

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, apabila ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi polri, maka akan ada sanksi yang dijatuhkan. Sanksi

³<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t54201d5dd397f/sanksi-jika-penyidik-menggunakan-barang-bukti>, diakses pada 31 Oktober 2016 pukul 23.33 WIB.

tersebut diputuskan melalui pemeriksaan dalam sidang oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didasarkan pada drajad pelanggaran yang dilakukan. Menurut Pasal 21 ayat (1), anggota polri yang dinyatakan sebagai pelanggar akan dikenakan sanksi pelanggaran kode etik profesi polri dan sanksi administratif.

Dalam Pasal 6 huruf i Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan pemaparan narasumber, penyidik polri yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin akan diberi sanksi berupa tindakan disiplin maupun hukuman disiplin. Pemaparan narasumber tersebut sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik, sedangkan hukuman disiplin dalam Pasal 9 berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;

- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, penjatuhan sanksi kode etik profesi Polri dan/atau sanksi disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata. Dalam hal ini penyidik polri yang melakukan penggelapan barang bukti juga dapat dikenai sanksi pidana. Adapun sanksi pidana yang dimaksud adalah Pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk tanggung jawab penyidik polri terhadap pengelolaan barang bukti adalah menjaga keutuhan barang bukti yang didapatkan, dengan cara segera menitipkan barang bukti tersebut kepada Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB) dalam waktu 1 x 24 jam.

Barang bukti dititipkan di Bagtahti dan Subbagtahti, Dittahti, Sattahti, Urttahti, atau di Rupbasan. Di Polda DIY sendiri, penyidik polri melakukan penitipan barang bukti di Dittahti atau jika di Dittahti tidak memungkinkan, maka barang bukti akan dititipkan di Rupbasan DIY. Penitipan barang bukti dilakukan sebagai wujud tanggung jawab penyidik polri terhadap keselamatan dan keamanan barang bukti.

2. Sanksi bagi penyidik polri yang menggelapkan barang bukti suatu tindak pidana adalah :
 - a. Sanksi pelanggaran kode etik profesi polri dan sanksi administratif;
 - b. Sanksi berupa tindakan disiplin maupun hukuman disiplin.
 - c. Sanksi pidana.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Ratna Nurul Afiah, 1989, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Website :

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t54201d5dd397f/sanksi-jika-penyidik-menggunakan-barang-bukti>, diakses pada 31 Oktober 2016 pukul 23.33 WIB.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 2. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90. Menteri Hukum Dan HAM. Jakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 204 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Menteri Hukum Dan HAM. Jakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608. Menteri Hukum dan HAM. Jakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686. Menteri Hukum dan HAM. Jakarta.